



PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENERAPAN TRIPLE BOTTOM LINE DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Muh. Rafli Ramlan¹, Rika Dwi Ayu Parmitasari²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh kepemilikan saham publik dan kepemilikan manajerial terhadap penerapan *Triple Bottom Line* dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel 10 perusahaan selama 5 tahun dengan periode 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Triple Bottom Line*. Sebaliknya, kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan *Triple Bottom Line*. Secara simultan, variabel kepemilikan publik dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Triple Bottom Line*. Selain itu, hasil penelitian MRA mengungkap bahwa profitabilitas mampu memperkuat pengaruh kepemilikan publik terhadap penerapan *Triple Bottom Line*, tetapi tidak mampu memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerapan *Triple Bottom Line*.

Kata Kunci: *Kepemilikan publik; kepemilikan manajerial; triple bottom line; profitabilitas.*

ABSTRACT

This study examines the influence of public share ownership and managerial ownership on the implementation of the Triple Bottom Line, with profitability as a moderating variable. This study uses a quantitative approach with multiple regression analysis and moderated regression analysis (MRA). The sampling technique used was purposive sampling with certain criteria, resulting in a sample of 10 companies for a five-year period (2020-2024). The results of the study indicate that public ownership partially has a positive and significant effect on the implementation of the Triple Bottom Line. Conversely, managerial ownership shows a negative and significant effect on the implementation of the Triple Bottom Line. Simultaneously, the variables of public ownership and managerial

ownership together are proven to have a positive and significant effect on the implementation of the Triple Bottom Line. Furthermore, the results of the MRA study reveal that profitability can strengthen the influence of public ownership on the implementation of the Triple Bottom Line, but is unable to strengthen the influence of managerial ownership on the implementation of the Triple Bottom Line.

Keywords: *Public ownership; managerial ownership, triple bottom line, profitability.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam pertambangan terbesar di dunia, di mana berdasarkan data, Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang emas terbesar kedua setelah Tiongkok, serta menempati posisi ketiga dunia dalam produksi mineral nikel (infografis.okezone.com). Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam jajaran sepuluh besar negara dengan potensi pertambangan terbesar secara global, yang kemudian membuka peluang ekonomi signifikan, terutama dalam sektor investasi saham. Seiring dengan tingginya permintaan terhadap komoditas tambang seperti batu bara, tren investasi saham di sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia menunjukkan peningkatan yang stabil, di mana saham batu bara menjadi salah satu instrumen investasi yang paling populer dan *profitable* (cnbcindonesia.com). Harga batu bara yang tetap bertahan pada level tinggi mendorong nilai saham perusahaan tambang meningkat, dan meskipun harga saham sektor ini relatif tinggi, tingkat pengembalian investasi (*return*) yang ditawarkan tetap menarik bagi investor yang mencari peluang di sektor pertambangan.

Gambar 1. Perkembangan Harga Batu Bara Secara Global Pada Tahun 2022



Sumber: cnbcindonesia.com

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 harga batu bara dunia acuan Newcastle untuk kontrak dua bulan ditutup di US\$ 389,60/ton dan sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang di US\$ 464/ton pada bulan September. Meskipun demikian, dari level tertinggi, harga batu bara acuan global telah surut

45%. Di sisi lain, terjadinya perang Rusia-Ukraina menyebabkan permintaan batu bara dari Eropa meningkat drastis sehingga akhirnya menciptakan keterbatasan pasokan. Meskipun harga telah surut dalam beberapa bulan terakhir, harga batu bara saat ini masih tetap berada pada level yang jauh lebih tinggi dari rata-rata dua tahun terakhir (cnbcindonesia.com). Apabila harga saham tinggi, maka nilai perusahaan tergolong baik, serta pemilik saham juga dapat dikatakan sejahtera.

Gambar 2. Kekayaan Pertambangan Indonesia



Sumber: infografis.okezone.com

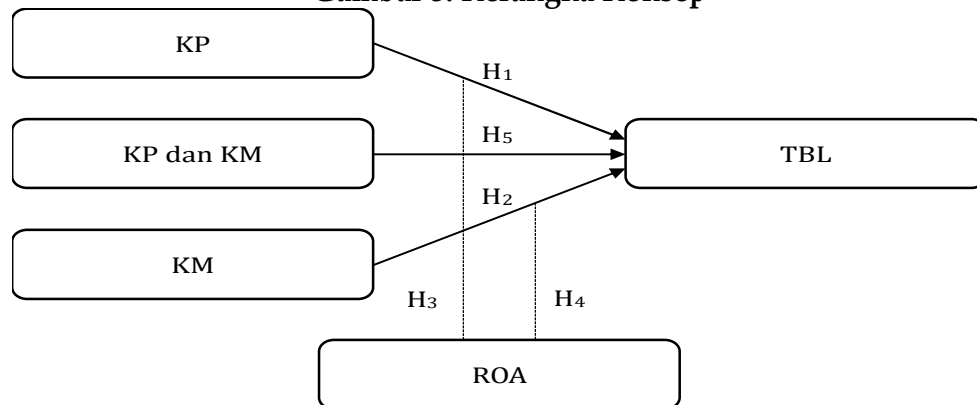
Gambar di atas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan mineral. Hal ini ditunjukkan dengan lima mineral yang dimiliki Indonesia dan masuk 10 besar dunia. Kelima mineral tersebut adalah bauksit, nikel, tembaga, timah, dan emas. Indonesia merupakan negara nomor 1 dunia untuk jumlah cadangan dan produksi nikel. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam industri nikel global. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan emas dan timah yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara penghasil emas dan timah utama dunia. Kekayaan mineral Indonesia merupakan sumber daya alam yang berharga. Oleh karena itu, perlu dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Pengelolaan mineral yang baik akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan pembangunan infrastruktur.

Perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berusaha keras untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak *go-public*. Hal ini disebabkan oleh perusahaan harus memiliki kinerja yang baik agar mendapatkan kepercayaan dari investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Guanabara et al. (2011) para investor membutuhkan analisis kinerja perusahaan dengan memperhatikan ukuran kinerja ekonomis berupa perolehan *profit*, ukuran kepedulian sosial, dan

pelestarian lingkungan untuk menilai dan memprediksi risiko investasinya atau biasa disebut dengan penerapan *Triple Bottom Line* pada perusahaan.

Dalam realitasnya, implementasi *Triple Bottom Line* di sektor pertambangan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan terkait isu-isu sosial dan lingkungan yang telah menjadi perhatian yang semakin besar. Berbagai permasalahan seringkali muncul, mulai dari konflik dengan masyarakat lokal terkait lahan dan dampak operasional pertambangan, hingga kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah akibat limbah pertambangan, serta deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Fenomena pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan menjadi isu krusial di Indonesia. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah tumpahan limbah tambang yang mencemari badan sungai, merusak kualitas air, serta mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, seperti yang terjadi pada kasus pencemaran sungai di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara akibat aktivitas pertambangan nikel (tempo.co). Selain itu, praktik relokasi masyarakat adat tanpa pemberian kompensasi yang memadai juga kerap menimbulkan konflik sosial, sebagaimana tercermin dalam kasus pemindahan paksa komunitas adat di Kalimantan Timur akibat perluasan wilayah pertambangan batu bara (kompas.com). Tidak hanya itu, aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan telah berkontribusi signifikan terhadap deforestasi dan perusakan habitat satwa liar, seperti yang terungkap dalam laporan kerusakan hutan di Kalimantan Tengah akibat operasi pertambangan emas ilegal (kompas.com). Tekanan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi lingkungan, dan bahkan pemerintah, semakin mendorong perusahaan pertambangan untuk lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasional mereka. Hal ini menjadi krusial tidak hanya untuk menjaga reputasi perusahaan di mata publik, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang dan menarik investasi yang semakin peduli terhadap praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Gambar 3. Kerangka Konsep



Keterangan

KP : Kepemilikan Publik (X_1)
 KM : Kepemilikan Manajerial (X_2)
 TBL : *Triple Bottom Line* (Y)
 ROA : Profitabilitas (Z)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 10 perusahaan sebagai objek penelitian. Desain penelitian digambarkan dalam bentuk hubungan kausal antar variabel dengan menggunakan model regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji pengaruh moderasi dari profitabilitas. Instrumen penelitian berupa data kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25, serta pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji interaksi (MRA).

HASIL

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi MRA

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.900 ^a	0.809	0.762	0.111771
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Publik, Kepemilikan Manajerial Profitabilitas, Kepemilikan Publik* Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial* Profitabilitas.				
b. Dependent Variable: <i>Triple Bottom Line</i>				

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah)

2. Uji t (Parsial)

Uji t berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas terhadap variabel

dependen yaitu *triple bottom line* secara parsial (satu persatu). Hasil dari uji parsial (uji t) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji T (Parsial) MRA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.764	0.137		5.596	0.000
	Kepemilikan Publik	0.276	0.069	0.944	4.031	0.001
	Kepemilikan Manajerial	-0.075	0.023	-0.750	-3.204	0.004
	Profitabilitas	0.116	0.042	0.637	2.779	0.011
	Kepemilikan Publik* Profitabilitas	4.456	4.456	0.713	2.387	0.021
	Kepemilikan Manajerial* Profitabilitas	0.027	0.035	0.078	0.778	0.445

a. Dependent Variable: *Triple Bottom Line*

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah)

DISKUSI

Kepemilikan Publik Berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Triple Bottom Line* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *triple bottom line*. Artinya, semakin tinggi proporsi kepemilikan saham oleh publik, semakin kuat pula komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Hal ini dikarenakan adanya tekanan dari beragam kepentingan eksternal, seperti masyarakat dan investor, yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan kinerja keberlanjutan dari operasional perusahaan, terutama di sektor pertambangan yang sangat bergantung pada legitimasi sosial dan pengawasan pasar yang efektif dari investor yang peduli *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Kepemilikan saham publik dalam perusahaan sektor pertambangan memainkan peran strategis dalam mendukung keberlanjutan jangka panjang, yang tercermin dalam penerapan *Triple Bottom Line* (TBL) yang mencakup aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Kepemilikan publik menyediakan suntikan modal eksternal yang signifikan bagi perusahaan, yang meningkatkan kapasitas pendanaan untuk program keberlanjutan (TBL). Modal ini tidak hanya digunakan untuk ekspansi dan efisiensi operasional serta modernisasi peralatan tambang, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi energi



terbarukan serta mendukung menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui pembangunan infrastruktur sosial, kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar tambang. Selain itu, modal publik juga dapat dialokasikan untuk investasi lingkungan seperti reboisasi, reklamasi lahan tambang, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan program konservasi. Kepemilikan publik yang tinggi, sebagaimana tercermin dari volume saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, cenderung turut mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta investor publik umumnya tidak selalu menuntut dividen yang tinggi secara langsung dalam jangka pendek, sehingga memungkinkan perusahaan menahan laba (*retained earnings*) sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendanai program-program TBL secara berkelanjutan. Dengan demikian, struktur kepemilikan publik dapat berperan dengan berkontribusi dalam penguatan aspek ekonomi (*profit*) melalui peningkatan efisiensi dan keuntungan operasional, aspek sosial (*people*) melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, serta aspek lingkungan (*planet*) melalui implementasi *green innovation* dan rehabilitasi lahan pascatambang.

Hasil penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh De Villiers et al. (2014) menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan publik cenderung menunjukkan pengungkapan kinerja lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya, penelitian Velte & Stawinoga (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berhubungan positif dengan praktik *triple bottom line* yang lebih luas. Christensen et al. (2021) menjelaskan bahwa transparansi yang didorong oleh kepemilikan publik berkontribusi pada peningkatan praktik keberlanjutan melalui pengawasan eksternal dan regulasi. Studi oleh Brogi & Lagasio (2019) turut mendukung bahwa tekanan dari publik dapat mendorong perusahaan melakukan *green innovation* yang selaras dengan prinsip TBL.

Kepemilikan Manajerial Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan *Triple Bottom Line* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan *triple bottom line*. Artinya, semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan aspek-aspek *triple bottom line*, yaitu ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*), sebagaimana diwujudkan dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Hal ini dikarenakan adanya fokus pihak manajemen pada keuntungan finansial jangka pendek yang didorong oleh insentif bonus, tingginya biaya pengungkapan TBL di sektor pertambangan, potensi *managerial entrenchment* yang mengurangi pengawasan efektif, serta asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham publik memperkuat kecenderungan manajer untuk mengontrol narasi pengungkapan keberlanjutan (*triple bottom line*). Manajer lebih memahami biaya



riil dan risiko TBL, sehingga mungkin memilih untuk menghindari pengungkapan jika dinilai tidak sejalan dengan kepentingan mereka sebagai pemilik dan pengelola.

Kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan sektor pertambangan cenderung mencerminkan potensi konflik kepentingan antara tujuan keberlanjutan perusahaan dan kepentingan pribadi manajerial. Proporsi saham yang signifikan yang dimiliki oleh manajer, yang memiliki karakteristik berbeda dari kepemilikan publik karena lebih berorientasi pada kepentingan finansial jangka pendek seperti perolehan bonus, tunjangan, dan dividen tinggi, dapat mendorong pengambilan keputusan yang berorientasi pada peningkatan laba jangka pendek dan pengembalian personal. Hal ini berpotensi mengabaikan investasi jangka panjang dalam program-program *Triple Bottom Line* (TBL) yang tidak segera menghasilkan keuntungan finansial, seperti program lingkungan dan sosial, serta mendorong perilaku manajemen yang mengutamakan akumulasi laba jangka pendek. Saham preferen yang dimiliki oleh manajemen cenderung digunakan untuk mengamankan keuntungan pribadi daripada mendanai aspek sosial dan lingkungan dalam TBL.

Hasil penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurleni et al. (2018) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki dampak signifikan dan negatif terhadap pengungkapan *triple bottom line* yang disebabkan biaya tinggi dan orientasi laba jangka pendek. Temuan serupa dikemukakan oleh Agustina & Lestari (2022), dan Sukhani & Hanif (2023) yang menegaskan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan proaktif dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan perusahaan (*triple bottom line*), karena dominannya orientasi pada profitabilitas dan tekanan untuk menjaga margin laba. Wiradikusumah (2024) juga mengaitkan peningkatan kepemilikan manajerial dengan dampak merugikan pada nilai perusahaan ketika penerapan *triple bottom line* diabaikan, karena investor mempersepsikan rendahnya komitmen keberlanjutan sebagai risiko reputasi dan risiko finansial jangka panjang. Serta penelitian yang dilakukan oleh Andow & David (2016) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas perusahaan akibat pengabaian terhadap strategi keberlanjutan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja jangka panjang.

Namun, hasil penelitian Karima (2014) bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan TBL. Temuan serupa dikemukakan oleh Anggraini (2006) dan Yudhistira & Saraswati (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berkontribusi dalam mendorong perusahaan lebih aktif mengomunikasikan aspek TBL kepada publik. Penelitian yang dilakukan oleh Jensen & Meckling (1976) dan Karima (2014) juga menunjukkan bahwa semakin



besar kepemilikan manajerial, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk mengungkapkan informasi *triple bottom line* dan menjalankan program keberlanjutan karena hal itu juga akan berdampak pada reputasi dan kinerja jangka panjang yang mereka miliki sebagai pemegang saham.

Kepemilikan Publik Berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Triple Bottom Line* yang dimoderasi profitabilitas pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memperkuat pengaruh kepemilikan publik terhadap penerapan *triple bottom line*. Artinya, tingkat profitabilitas yang tinggi memperkuat dorongan dari kepemilikan publik bagi perusahaan untuk mengimplementasikan prinsip keberlanjutan secara lebih komprehensif. Hal ini dikarenakan profitabilitas yang tinggi menyediakan sumber daya finansial yang memadai, memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam implementasi TBL tanpa mengorbankan kinerja inti bisnisnya, serta mengurangi persepsi risiko terkait pengungkapan TBL bagi pemegang saham publik.

Dalam konteks moderasi, profitabilitas perusahaan memperkuat hubungan antara kepemilikan publik terhadap penerapan *Triple Bottom Line* pada perusahaan sektor pertambangan. Ketika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas atau laba yang tinggi, hal ini memperbesar kemampuan finansial perusahaan secara signifikan, yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan dana dalam skala besar ke berbagai strategi keberlanjutan secara menyeluruh. Keuntungan yang diperoleh dari laba yang tinggi dapat digunakan untuk membiayai program-program lingkungan seperti reboisasi, reklamasi lahan tambang, pengolahan limbah ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, atau fasilitas pelatihan bagi masyarakat lokal. Selain itu, profitabilitas yang tinggi dan kuat memberikan ruang serta kepercayaan diri yang lebih besar bagi perusahaan, khususnya pada sektor pertambangan dengan basis kepemilikan publik yang kuat, untuk tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi dan menurunkan risiko keuangan, tetapi juga menyalurkan sebagian laba ke aspek sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) yang menjadi inti dari TBL. Dalam konteks kepemilikan publik, kondisi keuangan yang kuat akan memperbesar insentif dan legitimasi perusahaan untuk menunjukkan komitmen pada prinsip keberlanjutan kepada para pemegang saham dan publik secara luas. Dengan kata lain, laba besar bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi *enabler* atau pemungkin utama bagi perusahaan pertambangan dengan karakteristik kepemilikan saham publik yang kuat untuk mengimplementasikan prinsip keberlanjutan secara optimal pada aspek *profit*, *people*, dan *planet*.

Hasil penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni & Febriansyah (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memperkuat hubungan antara TBL dan nilai perusahaan, serta penelitian oleh Velte & Stawinoga (2016) menemukan bahwa perusahaan dengan



kepemilikan publik yang tinggi dan didukung oleh profitabilitas yang baik cenderung lebih aktif dalam mengungkapkan aspek *triple bottom line*. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Christensen et al. (2021), yang menekankan bahwa profitabilitas yang kuat mendorong perusahaan lebih transparan dan akuntabel kepada publik, termasuk dalam pelaksanaan praktik keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip TBL.

Kepemilikan Manajerial Berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerapan *Triple Bottom Line* yang dimoderasi profitabilitas pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerapan *triple bottom line*. Artinya, ketersediaan laba atau tingkat profitabilitas perusahaan tidak secara signifikan atau tidak mampu mengubah atau menjadi faktor penting yang memperkuat kecenderungan manajer yang memiliki saham untuk lebih berkomitmen pada pengungkapan *triple bottom line*, yaitu ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*). Hal ini dikarenakan adanya insentif yang tidak selaras antara profitabilitas dan TBL, di mana sistem kompensasi manajer mungkin masih sangat terikat pada metrik kinerja finansial jangka pendek, sehingga manajer tidak melihat insentif yang cukup untuk mengalokasikan keuntungan ke implementasi TBL yang berjangka panjang. Selain itu, manajer mungkin masih memandang TBL sebagai biaya yang relatif tinggi pada perusahaan sektor pertambangan yang dapat mengurangi laba, sehingga meskipun profitabilitas positif, manajer enggan mengalokasikan laba untuk program TBL yang tidak secara langsung meningkatkan keuntungan jangka pendek, dan kurangnya tekanan dari pemangku kepentingan dan investor untuk memanfaatkan profitabilitas dalam mendukung implementasi TBL secara nyata.

Dalam konteks moderasi, profitabilitas perusahaan antara kepemilikan manajerial terhadap penerapan *Triple Bottom Line* pada perusahaan sektor pertambangan, hasilnya menunjukkan ambiguitas yang bergantung pada orientasi manajerial itu sendiri. Secara umum, sekalipun perusahaan mencatatkan profitabilitas yang tinggi, hal ini tidak selalu menjamin bahwa laba tersebut akan digunakan untuk program keberlanjutan. Manajemen yang memiliki orientasi jangka pendek lebih cenderung memanfaatkan *profit* untuk meningkatkan pengembalian pribadi melalui dividen dan bonus, alih-alih mengalokasikannya pada investasi keberlanjutan seperti tanggung jawab sosial perusahaan, pelestarian lingkungan, atau program pemberdayaan masyarakat. Dalam kasus ini, profitabilitas justru memperlemah atau bahkan menetralkan niat perusahaan untuk mengalokasikan dana pada aspek sosial dan lingkungan TBL. Akan tetapi dalam praktiknya, profitabilitas tinggi lebih sering dianggap sebagai peluang untuk memperbesar insentif pribadi, bukan sebagai dasar untuk memperluas komitmen keberlanjutan. Di sisi lain, apabila kepemilikan manajerial didasari oleh visi jangka panjang dan nilai-nilai keberlanjutan yang kuat, maka profitabilitas



yang tinggi justru dapat memperkuat komitmen terhadap TBL karena ketersediaan modal yang cukup besar memungkinkan implementasi program-program tersebut, termasuk praktik operasional ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan penguatan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, profitabilitas hanya menjadi moderator yang efektif jika selaras dengan orientasi keberlanjutan dari manajemen perusahaan itu sendiri.

Hasil penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwaningsih (2019) yang secara eksplisit menyimpulkan bahwa profitabilitas sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, yang sejalan dengan temuan bahwa profitabilitas tidak cukup menjadi pendorong peningkatan kinerja keberlanjutan (*triple bottom line*). Penelitian Sugiyanto et al. (2021) dan Sari & Rosini (2024) juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi hubungan antara *triple bottom line* dengan nilai perusahaan, atau antara *Sustainability Reporting* dan nilai perusahaan, sehingga menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak otomatis meningkatkan komitmen keberlanjutan. Demikian pula, Ilmi et al. (2017) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial tidak signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan *triple bottom line*, yang secara implisit mendukung bahwa moderasi profitabilitas tidak memberi perbedaan berarti.

Namun, hasil penelitian Ramadhan (2016) bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, yang menemukan bahwa profitabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, di mana hubungan antara nilai perusahaan dengan TBL mampu diperkuat oleh profitabilitas. Demikian pula, Wahyuni & Febriansyah (2023) juga menyatakan bahwa profitabilitas memperkuat hubungan antara nilai perusahaan dengan penerapan prinsip *triple bottom line*.

Kepemilikan Publik Berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Triple Bottom Line* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *triple bottom line*. Artinya, kepemilikan publik dan kepemilikan manajerial secara kolektif mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan TBL secara lebih efektif. Hal ini dikarenakan adanya sinergi antara tekanan eksternal dari kepemilikan publik dan komitmen internal dari kepemilikan manajerial, yang menciptakan sistem tata kelola yang lebih komprehensif dan mampu mengimbangi potensi fokus jangka pendek manajerial.

Ketika kepemilikan publik dan manajerial hadir secara simultan berada dalam satu struktur kepemilikan perusahaan pertambangan, maka terjadi tarik-menarik antara kepentingan kepentingan pemegang saham publik dan manajerial.



Keduanya membentuk dinamika yang kompleks terhadap penerapan *Triple Bottom Line*. Kepemilikan publik cenderung mendorong perusahaan untuk lebih transparan, akuntabel dan berkomitmen pada program keberlanjutan (TBL), terutama dalam aspek keberlanjutan sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Sedangkan kepemilikan manajerial yang berpotensi lebih fokus pada profitabilitas dan efisiensi internal, jika tidak diarahkan dengan visi jangka panjang, cenderung memprioritaskan pencapaian keuntungan pribadi dalam jangka pendek. Namun, jika keduanya dapat disinergikan, maka dapat menghasilkan keseimbangan strategis dan perusahaan dapat mengimplementasikan *Triple Bottom Line* secara lebih holistik. Tekanan dari pemegang kepemilikan saham publik dapat mendorong akuntabilitas perusahaan dan dapat menyediakan modal untuk investasi jangka panjang dalam implementasi keberlanjutan perusahaan (TBL), sementara kepemilikan manajerial, bila terinternalisasi nilai keberlanjutan, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan responsif terhadap isu-isu strategis, termasuk eksekusi program-program keberlanjutan perusahaan (TBL) yang efisien dan berdampak. Modal yang berasal dari saham publik umumnya ditujukan untuk ekspansi operasional dan mendukung investasi jangka panjang, termasuk implementasi TBL yang berkelanjutan. Di sisi lain, modal dari saham manajerial (saham preferen) lebih terfokus pada memaksimalkan pengembalian finansial dalam jangka pendek. Perbedaan peran dan prioritas penggunaan modal dan laba dari kedua jenis kepemilikan ini, terutama terkait dengan kebijakan dividen dan alokasi laba ditahan untuk operasional dan program TBL, menjadi faktor kunci yang menentukan sejauh mana perusahaan pertambangan dapat secara holistik mengintegrasikan TBL dalam strategi bisnis perusahaan. Oleh karena itu, integrasi peran keduanya memerlukan komitmen dari manajemen dan tata kelola perusahaan yang mampu menyelaraskan kepentingan publik dan kepentingan pribadi manajerial demi pencapaian tujuan keberlanjutan jangka panjang (TBL). Jika insentif manajerial diarahkan untuk mendukung tanggung jawab sosial perusahaan dan kelestarian lingkungan, maka kombinasi kedua bentuk kepemilikan ini dapat memperkuat integrasi TBL secara menyeluruh di sektor pertambangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haniffa & Cooke (2005) yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kombinasi tingkat kepemilikan publik dan manajerial yang seimbang cenderung lebih terbuka dalam pengungkapan informasi *triple bottom line*. Demikian pula, Gull et al. (2023) juga menunjukkan bahwa interaksi antara kedua jenis kepemilikan tersebut dapat memperkuat tata kelola perusahaan melalui peningkatan akuntabilitas dan pengungkapan *triple bottom line*. Sementara itu, studi oleh Velte & Stawinoga (2016) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan publik dan manajerial secara simultan menunjukkan komitmen lebih tinggi terhadap keberlanjutan dengan integrasi yang kuat terhadap tiga dimensi TBL



REFERENSI

- Agustina, D., & Lestari, H. S. (2022). The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility Moderated Financial Performance of Food & Beverage Industry in Indonesia. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 5(4), 36-52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6972667>
- Andow, H. A., & David, B. M. (2016). Ownership structure and the financial performance of listed conglomerate firms in Nigeria. *The Business & Management Review*, 7(3), 231-240.
- Anggraini, F. R. R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta), *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, 1-21. http://repository.usd.ac.id/32801/1/4747_K-AKPM-24.pdf
- Apriani, P. P., & Khairani, S. (2023). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *MDP Student Conference*, 2(2), 100-107. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.3958>
- Brogi, M., & Lagasio, V. (2019). Environmental, social, and governance and company profitability: Are financial intermediaries different?. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(3), 576-587. <https://doi.org/10.1002/csr.1704>
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and Sustainability Reporting: Economic analysis and review. *Review of Accounting Studies*, 26(3), 1176-1248. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>
- De Villiers, C., Low, M., & Samkin, G. (2014). The institutionalisation of mining company sustainability disclosures. *Journal of Cleaner Production*, 84, 51-58. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.089>
- Elkington, J. (1998). Partnerships from cannibals with forks: The Triple Bottom Line of 21st-Century Business. *Environmental Quality Management*, 8(1), 37-51. <https://doi.org/10.1002/tqem.3310080106>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675>
- Gull, A. A., Hussain, N., Khan, S. A., Khan, Z., & Saeed, A. (2023). Governing Corporate Social Responsibility Decoupling: The effect of the Governance Committee on Corporate Social Responsibility Decoupling. *Journal of Business Ethics*, 185(2), 349-374. <http://dx.doi.org/10.1007/s10551-022-05181-3>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391-430. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001>



- Ilmi, M., Kustono, A. S., & Sayekti, Y. (2017). Effect Of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure And Managerial Ownership To The Corporate Value With Financial Performance As Intervening Variables: Case On Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Social Science And Business*, 1(2), 75-88. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104043>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Karima, N. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Widya Warta*, 2(2), 219-230. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i1.277>
- Nurleni, N., Bandang, A., Darmawati, & Amiruddin, A. (2018). The effect of managerial and institutional ownership on corporate social responsibility disclosure. *International Journal of Law and Management*, 60(4), 979-987. <https://doi.org/10.1108/ijlma-03-2017-0078>
- Pandiangan, S. M. T., Oktafiani, F., Panjaitan, S. R., Shifa, M., & Jefri, R. (2022). Analysis of Public Ownership and Management Ownership on the Implementation of the Triple Bottom Line in the Plantation Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(1), 3489-3497. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4016>
- Purwaningsih, E. S. (2019). THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND MANAGERIAL OWNERSHIP ON COMPANY VALUE WITH PROFITABILITY AS A MODERATING VARIABLE. *Journal of International Conference Proceedings*, 2(1). <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i1.423>
- Ramadhan, R. P. (2016). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35682>
- Sari, W. N., & Rosini, I. (2024). MANAGERIAL OWNERSHIP MODERATING SUSTAINABILITY REPORTING AND PHILANTHROPY DISCLOSURE ON FIRM VALUE. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 2(6), 1994-2007. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i6.337>
- Sugiyanto, E., Trisnawati, R., & Kusumawati, E. (2021). Corporate Social Responsibility and Firm Value with Profitability, Firm Size, Managerial Ownership, and Board of Commissioners as Moderating Variables. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 18-26. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.14107>



- Sukhani, N., & Hanif, H. (2023). The Role of Environmental Performance in The Effect of Managerial Ownership, Independent Board of Commissioners, and Social Costs on Corporate Social Responsibility Disclosure. *Journal of The Community Development in Asia*, 6(2), 179-193. <https://doi.org/10.32535/jcda.v6i2.2325>
- Velte, P., & Stawinoga, M. (2016). Integrated Reporting: The Current State of Empirical Research, Limitations and Future Research Implications. *Journal of Management Control*, 28(3), 275-320. <https://doi.org/10.1007/s00187-016-0235-4>
- Wahyuni, S., & Febriansyah, S. (2023). Determinasi Triple Bottom Line Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas dan Volatilitas Arus Kas Sebagai Pemoderasi dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 1-10. <https://doi.org/10.29103/jak.v11i1.8506>
- Wijayanti, N. (2009). *Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Publik terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/7324/MTk2MDI=/>
- Yudhistira, A. M., & Saraswati, E. (2016). Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial dan Kepemilikan Saham Institusional Terhadap Return On Equity. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10, 1-9.
- Yuesti, A., Novitasari, L. G., & Rustiarini, N. W. (2016). Accountability of Non Government Organization from the Perspective of Stakeholder Theory. *International Journal of Accounting and Taxation*, 4(2), 98-119. <https://doi.org/10.15640/ijat.v4n2a7>